

MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN BERBASIS *KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE* (KAP) OLEH KBPPPA KABUPATEN GRESIK DALAM MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT BERISIKO STUNTING DI DESA PONGANGAN

Calvina Izumi

Program Studi Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
calvinaizumi13@gmail.com

Moh. Dey Prayogo,

Program Studi Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
deyprayogo@untag-sby.ac.id

Jupriono

Program Studi Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
juprion@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan serius di Indonesia yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model komunikasi pembangunan yang diterapkan oleh KBPPPA Kabupaten Gresik dalam membangun kesadaran masyarakat berisiko stunting di Desa Pongangan, Kecamatan Manyar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KBPPPA menerapkan model komunikasi perubahan perilaku berbasis Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) yang bersifat adaptif, berlapis, dan interaktif. Implementasinya mencakup empat tahapan: identifikasi kelompok sasaran berdasarkan tingkat pendidikan dan kondisi sosial-ekonomi, penyusunan pesan persuasif yang kontekstual, penyebaran pesan melalui kombinasi komunikasi tatap muka dan digital, serta evaluasi triwulanan berbasis data portal GUS (Gresik Urus Stunting). Temuan juga mengungkap inovasi berupa program orang tua asuh, penggunaan figur otoritas sebagai strategi komunikasi, serta pendekatan preventif melalui aplikasi ELSIMIL bagi calon pengantin. Model KAP yang diterapkan terbukti melampaui asumsi liniernya karena dalam praktiknya dipengaruhi secara dinamis oleh faktor pengetahuan, sikap, ekonomi, dan budaya secara bersamaan. Meski efektif pada kelompok yang relatif stabil, model ini memiliki keterbatasan pada komunitas yang rentan secara struktural. Penelitian ini merekomendasikan integrasi Model Komunikasi Partisipatif agar masyarakat berperan sebagai subjek aktif, serta

perluasan kolaborasi lintas sektor termasuk dengan pihak industri melalui program CSR.

Kata Kunci: *Komunikasi Pembangunan, Model KAP, Stunting, KBPPPA Gresik, Perubahan Perilaku*

ABSTRACT

Stunting remains a serious public health issue in Indonesia with long-term impacts on human resource quality. This study aims to explore the development communication model applied by KBPPPA Gresik Regency in raising awareness among stunting-risk communities in Pongangan Village, Manyar District. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews, observation, and data source triangulation. The findings reveal that KBPPPA implements a behavior change communication model based on Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) that is adaptive, multilayered, and interactive. Its implementation encompasses four stages: target group identification based on education level and socio-economic conditions, contextual persuasive message design, message dissemination through a combination of face-to-face and digital communication, and quarterly evaluation using data from the GUS (Gresik Urus Stunting) portal. The study also uncovers innovations including a foster parent program, the use of authority figures as a communication strategy, and a preventive approach through the ELSIMIL application for prospective married couples. The KAP model applied in practice transcends its linear assumptions, as it is dynamically shaped by knowledge, attitude, economic, and cultural factors simultaneously. While effective among socially and economically stable groups, it shows limitations among structurally vulnerable communities. This study recommends integrating a Participatory Communication Model to position communities as active subjects, alongside expanding cross-sector collaboration, including with industrial sectors through CSR programs.

Keywords: *Development Communication, KAP Model, Stunting, KBPPPA Gresik, Behavior Change*

A. PENDAHULUAN

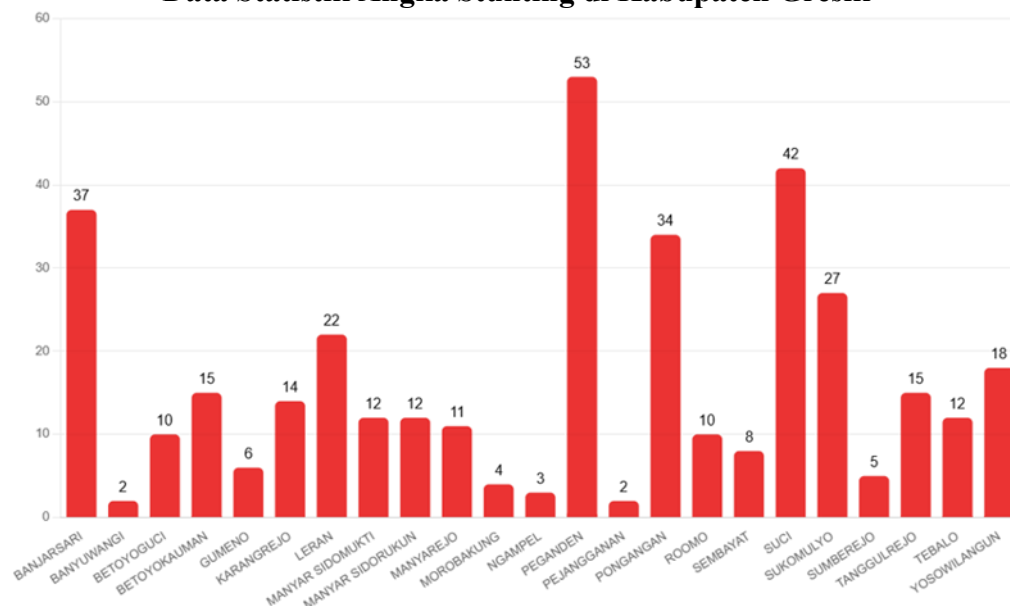
Stunting masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang mendapat perhatian serius di Indonesia karena dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang panjang, khususnya pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Dalam (Rahmadhita, 2020) Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi akibat rendahnya asupan nutrisi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga kebutuhan gizi tubuh tidak terpenuhi secara optimal karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dampak stunting tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak, tetapi juga terhadap perkembangan kognitif, kemampuan belajar, tingkat produktivitas, serta kualitas kesehatan hingga masa dewasa. Oleh sebab itu,

percepatan penurunan angka stunting menjadi salah satu bagian penting dalam agenda pembangunan nasional.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mempercepat pencegahan stunting mulai diperkuat melalui Rapat Tingkat Menteri yang dilaksanakan pada 12 Juli 2017 dan dipimpin oleh Wakil Presiden (Wakil Sekretariat Presiden Indonesia, 2019). Dalam pertemuan tersebut ditegaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan multisektor dengan mengintegrasikan berbagai program di tingkat nasional, daerah, hingga masyarakat. Upaya tersebut bertujuan untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pencegahan stunting. Menurut Kementerian Koordinator BPMDK sebagaimana dikutip dalam (Zaen et al., 2024), upaya penurunan angka stunting di Indonesia mengacu pada komitmen internasional, yakni target yang dicanangkan oleh World Health Assembly (WHA) untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 40% pada 2025, dengan acuan kondisi tahun 2013 sebagai baseline. Di samping itu, sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), pemerintah juga berkomitmen untuk mengeliminasi segala bentuk malnutrisi paling lambat pada tahun 2030.

Kabupaten Gresik masih menjadi salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan stunting, termasuk di Desa Pongangan, Kecamatan Manyar. Karakter masyarakat yang beragam, tingginya mobilitas penduduk, serta lingkungan kawasan industri menjadikan Desa Pongangan memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program pencegahan stunting. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta penerapan pola asuh yang tepat sebagai upaya pencegahan stunting. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan perlu terus dioptimalkan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat secara lebih efektif.

Data Statistik Angka Stunting di Kabupaten Gresik



Gambar 1. 1 Data stunting di kabupaten Gresik

Sumber: <https://gus.gresikkab.go.id/>

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik melalui website GUS (Gresik Urus Stunting), tercatat 3.502 kasus stunting sepanjang tahun 2022–2025 dengan pola yang fluktuatif, di mana kasus tertinggi terpusat di Desa Peganden (53 kasus), Suci (42 kasus), Banjarsari (37 kasus), dan Pongangan (34 kasus). Kecamatan Manyar menjadi salah satu wilayah dengan beban kasus cukup tinggi, sementara Desa Pongangan memerlukan perhatian khusus mengingat karakteristik lingkungan industrinya yang membedakan pendekatan penanganan stunting di wilayah tersebut dari daerah lainnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa program-program yang telah berjalan belum mampu menekan angka stunting secara optimal, sehingga komunikasi pembangunan terkait kesadaran gizi masih perlu diperkuat, khususnya bagi keluarga muda dan ibu yang memiliki balita.

Penjelasan di atas menjadikan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Kabupaten Gresik memiliki peran penting dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan terkait pencegahan stunting. KBPPPA merupakan lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga, dan perlindungan anak, sehingga kedekatannya dengan masyarakat memudahkan penerapan berbagai pendekatan komunikasi, baik interpersonal, kelompok, maupun berbasis budaya lokal, secara lebih efektif dibandingkan lembaga pemerintah formal lainnya. Dalam menjalankan perannya, Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik tidak hanya mengandalkan komunikasi langsung melalui penyuluhan dan pendampingan keluarga, tetapi juga memanfaatkan media digital seperti WhatsApp Group dan media sosial sebagai sarana penyebaran pesan edukatif. Perpaduan kedua pendekatan tersebut menjadi strategi komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Desa Pongangan.

Pengetahuan ibu tentang gizi dapat meningkat jika edukasi disampaikan dengan metode komunikasi yang tepat dan mudah dipahami. Dalam hal ini, selain pendekatan tatap muka, media sosial turut berperan sebagai sarana strategis dalam penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat (Pratiwi & Kurniasari, 2024). Namun demikian, komunikasi secara langsung tetap memiliki peranan penting, khususnya pada masyarakat pedesaan. Dalam (Herdian Nugroho, 2024) dijelaskan bahwa efektivitas komunikasi kesehatan di desa dipengaruhi oleh norma budaya, kedekatan sosial, serta hubungan antarwarga. Oleh karena itu, komunikasi pembangunan dalam upaya pencegahan stunting perlu memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat agar pesan kesehatan dapat dipahami, diterima, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian sebelumnya oleh Hasan Sazali dkk. (2022) dengan judul “Komunikasi Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara”. Meski demikian, penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Kajian ini belum mendalami model komunikasi pembangunan secara menyeluruh, terutama menyangkut pola, alur, dan hubungan antaraktor dalam proses komunikasi. Selain itu, fokusnya yang terpusat pada Dinas Kesehatan membuat peran lembaga lain seperti KBPPPA yang memiliki pendekatan berbasis keluarga, perempuan, dan sosial belum banyak diteliti. Perbedaan lokasi penelitian juga menjadi celah penting, mengingat karakteristik sosial dan budaya setiap daerah dapat memengaruhi bentuk komunikasi yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi

keterbatasan tersebut dengan lebih menekankan pada implementasi program serta mengkaji secara spesifik bagaimana komunikasi KBPPPA berbasis kearifan lokal di Kabupaten Gresik mampu membangun kesadaran masyarakat yang berisiko stunting.

Berdasarkan kondisi tersebut, serta urgensi tingginya angka stunting di Desa Pongangan, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengeksplorasi model komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh KBPPPA Kabupaten Gresik dalam membangun kesadaran masyarakat berisiko stunting di Desa Pongangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar mampu mengeksplorasi fenomena secara mendalam, termasuk memahami bagaimana KBPPPA menyusun dan menyampaikan pesan edukasi, membangun interaksi komunikasi dengan masyarakat, serta menilai upaya pembangunan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat terkait pencegahan stunting.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan Teknik kualitatif dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana komunikasi Pembangunan KBPPPA Kabupaten Gresik dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap stunting. Creswell mendefinisikan Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menguji hipotesis berdasarkan landasan teori tertentu melalui analisis keterkaitan antar variabel. Setiap variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan instrumen yang telah ditetapkan, menghasilkan data numerik dari lapangan yang selanjutnya diolah dan diinterpretasikan melalui prosedur analisis statistik (Creswell J. W, 2014). Menurut Leavy, (2017) penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, yakni suatu pandangan yang meyakini bahwa realitas yang ada di luar proses penelitian dapat diukur secara objektif melalui penerapan metode ilmiah. Dengan demikian, penelitian kualitatif berorientasi pada proses eksplorasi mendalam terhadap suatu kasus, baik dalam bentuk beberapa kasus maupun kasus tunggal (Rijal Fadli, 2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Saputra Adi Ikhsan et al., 2024). Pendekatan penelitian ini guna mendalami khususnya terkait model komunikasi pembangunan yang diterapkan oleh KBPPPA Kabupaten Gresik, terutama di Desa Pongangan, dalam upaya menurunkan angka stunting. Pendekatan ini dipilih karena dinilai sesuai untuk menggali pemahaman, proses, serta konteks sosial yang berlangsung secara alami, sehingga mampu menghasilkan uraian yang rinci dan komprehensif mengenai topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian KBPPPA, dan objek penelitiannya model komunikasi Pembangunan dalam membangun kesadaran masyarakat berisiko stunting. Penelitian ini melihat bagaimana program atau strategi komunikasi yang digunakan KBPPPA Desa Pongangan untuk membangun kesadaran masyarakat berisiko stunting. Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara secara mendalam kepada KBPPPA dan didukung data sekunder berupa buku pedoman stratanas Indonesia, website GUS, dan artikel media massa yang meliput KBPPPA yang berkaitan dengan garis besar penelitian. Serta keabsahan Triangulasi sumber data digunakan pada penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi pembangunan yang diterapkan oleh KBPPPA Kabupaten Gresik dalam upaya pencegahan stunting di Desa Pongangan mengarah pada pendekatan komunikasi perubahan perilaku berbasis *Knowledge, Attitude, and Practice* (KAP). Berdasarkan (Cangara Hafied, 2020) KAP adalah singkatan dari Knowledge (Pengetahuan), Attitude (Sikap), dan Practice (Praktik), sebuah model yang biasa digunakan dalam beragam program kampanye kesehatan. Melalui model ini, komunikasi diposisikan sebagai instrumen untuk menumbuhkan pengetahuan, membentuk sikap, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Implementasi yang dilakukan KBPPPA yaitu, terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap karakteristik masyarakat sebelum menyampaikan pesan komunikasi. Pemetaan dilakukan melalui identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pesan. Pemetaan dibagi menjadi 2 yaitu: faktor pendidikan (pengetahuan), dan faktor di luar pendidikan seperti kondisi ekonomi, budaya, dan akses layanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mudah memahami informasi, namun memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau resistensi. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih rendah membutuhkan pendekatan persuasif melalui tokoh masyarakat agar pesan lebih mudah diterima. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan terkait stunting sehingga proses penerimaan informasi cenderung lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi tidak dapat dilakukan secara seragam kepada seluruh kelompok masyarakat. Dengan demikian identifikasi kesenjangan pada aspek pengetahuan masyarakat, dapat menentukan langkah strategi yang efektif pada proses komunikasi. Oleh karena itu ini menjadi tahap awal yang krusial sekaligus dasar bagi kader dalam menyusun pesan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Koordinator penyuluhan yang menyatakan bahwa:

“Insya Allah ada, Mbak. Jadi sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Jadi kalau yang masih lulusan sampai SMP, insya Allah pendekatannya nanti ya, ya itu tadi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, jadi mereka lebih percaya kepada mereka. Kalau SMA ke atas, insya Allah kader TPK memberitahu pasti mereka akan menerima. Karena mereka sudah tinggi pendidikannya. Dan terus terang, jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Karena yang kita sentuh adalah manusia atau putra-putri mereka.” – Bambang Koordinator penyuluh

Sebaliknya, pada kelompok masyarakat berpendidikan rendah, terbatasnya pengetahuan tentang stunting menjadi hambatan dalam penerimaan informasi, sehingga pendekatan komunikasi perlu melibatkan tokoh masyarakat seperti ketua RW dan camat yang dipercaya dan berpengaruh di lingkungannya. Keberadaan mereka dinilai efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan bahwa:

“Tingkat lulusan sekolah itu berpengaruh, meskipun SDM pengetahuannya tinggi, tetap ada yang mengalami resiko stunting meskipun lebih sedikit. jadi untuk orang-orang yang sekiranya SDM yang di atas, yang menengah ke atas gitu, kita

cara pendekatannya juga harus hati-hati benar. bahasanya mbak vina. Jadi kalau yang SDM-nya sudah tinggi gitu, kita memang harus hati-hati. Khawatirnya apa? Nanti khawatir salah paham, sakit hati, terus gak mau kembali lagi lah. Itu yang susah. Jadi harus benar-benar kita tata untuk perkataan kita, komunikasi kita. Karena memang mereka itu pendidikannya sudah, maksudnya tinggi, cuma memang mungkin karena dia itu bekerja atau apa. Itu kan faktor lain. Pengasuhan orang tua sendiri dengan pengasuhan nenek itu kan beda” – Nur Chasanah ketua Kader dan TPK

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pola penerimaan pesan berbeda antar kelompok masyarakat. Kelompok berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih cepat memahami informasi, namun membutuhkan pendekatan komunikasi yang setara dan tidak menggurui agar pesan tidak ditolak. Selain komunikasi langsung, pelibatan tokoh masyarakat seperti ketua RW, camat, tokoh agama, serta organisasi perempuan seperti Muslimat dan Aisyiyah sebagai opinion leader terbukti meningkatkan kepercayaan dan penerimaan pesan di masyarakat. Pola ini sejalan dengan konsep komunikasi pembangunan yang menekankan peran change agent dalam menjembatani pesan kepada khalayak dengan beragam latar belakang sosial-budaya.

Setelah melakukan identifikasi kelompok sasaran, KBPPPA menyusun pesan komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Penyampaian pesan dilakukan menggunakan bahasa sederhana, persuasif, dan tidak menggurui. Dalam pedoman strategi komunikasi nasional percepatan penurunan stunting (Kesehatan Kementerian Republik Indonesia, 2018), ada 3 fase pemahaman masyarakat terhadap stunting. Setiap fase memiliki kunci pesannya masing-masing. Fase (1) : pengenalan konsep stunting, pentingnya penanganan stunting, dan langkah pencegahan stunting. Pesan ini harus disampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, karena pada fase pertama sasaran informasi untuk kelompok masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang rendah terhadap stunting. Fase (2) : pengenalan tentang perubahan perilaku untuk langkah pencegahan, penanganan, maupun kepedulian dan kesadaran terhadap kasus stunting. Fase (3) : pesan untuk peningkatan motivasi kepada kelompok sasaran dan memperkuat kontrol sosial di lingkungan masyarakat. Koordinator Penyuluh menjelaskan:

"Kalau kita langsung mengatakan anak ibu ini kena stunting, mereka pasti marah. Jadi jangan sekali-sekali menyinggung, jadi ibu, anak ibu ini kayaknya 'berisiko'. Jadi bukan anak ibu stunting, tapi bilang anak ibu ini 'berisiko'. Kalau boleh tahu ini makannya sehari berapa kali, terus menu apa saja. Kalau kita langsung to the point, wah anak ibu ini stunting, harus dirujuk. Nah itu mereka pasti akan minder, kemudian akan mundur perlahan.” – Bambang, Koordinator Penyuluh

Fase ini diharapkan dapat mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai stunting dan merubah perilaku yang berkelanjutan untuk percepatan penurunan stunting, menghindari resistensi dan menjaga keterbukaan masyarakat. KBPPPA memiliki kader disetiap RT. Kader ini yang akan menyampaikan pesan kepada

masyarakat dan yang melaksanakan program posyandu serta pendataan disetiap RT. Kader tidak hanya memberikan informasi satu arah, tetapi juga komunikasi dua arah yang bersifat interpersonal. Melalui pendekatan interpersonal, dirasa masyarakat lebih nyaman dan terbuka, hal ini juga dilakukan untuk menghindari resistensi dari masyarakat. Selain komunikasi secara langsung, KBPPPA menerapkan komunikasi secara tidak langsung melalui digital. Pesan dikemas melalui broadcast WhatsApp, poster, infografis, dan video edukasi mengenai gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan stunting. Selain WhatsApp KBPPPA juga memanfaatkan instagram melalui akun @kbpppa_gresik dan @pemkabgresik. Penyebaran kampanye juga perlu adanya struktur materi dan visual yang menarik. Materi komunikasi selanjutnya dikemas dalam berbagai format visual yang disebarakan melalui platform digital. Pertama, broadcast WhatsApp yang digunakan untuk penyampaian informasi cepat seperti pengumuman jadwal posyandu, sosialisasi, dan himbuan pencegahan stunting. Informasi disebarakan secara berjenjang mulai dari grup PPKBD sebagai ketua kader tingkat desa, diteruskan ke sub-PPKBD, hingga menjangkau grup posyandu masing-masing RW. Kedua, poster dan infografis yang dibagikan melalui Instagram dan WhatsApp Group untuk menyampaikan informasi secara visual. Media ini dinilai efektif karena masyarakat cenderung lebih mudah memahami informasi visual dibandingkan teks panjang. Ketiga, konten video melalui akun Instagram @kbpppa_gresik yang menyampaikan edukasi kesehatan dalam format audio visual. Penggunaan video dinilai lebih menarik perhatian dan menjangkau kalangan muda serta ibu rumah tangga yang aktif di media sosial.

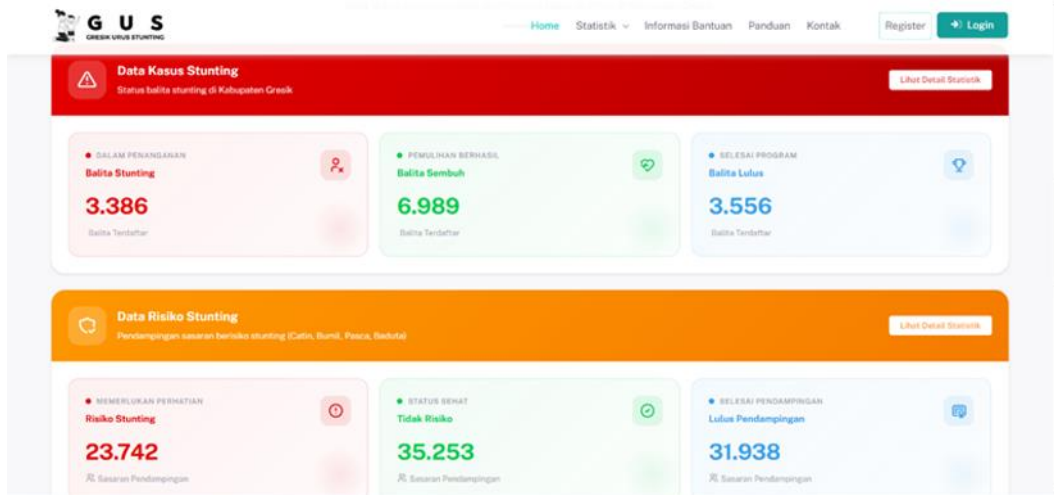
Selain komunikasi tatap muka dan media sosial, KBPPPA Kabupaten Gresik melakukan pendekatan berbasis kearifan lokal dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat efektivitas komunikasi pembangunan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan komunikasi serta memperkuat legitimasi program di mata masyarakat. Kepala Bidang KS menjelaskan bahwa penanganan stunting dilakukan melalui intervensi sensitif yang melibatkan berbagai organisasi dan lembaga. Ia menyatakan bahwa:

“Ada dua cara yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif atau intervensi yang dilakukan secara tidak langsung, intervensi ini dilakukan oleh pengeroyokan berbagai lintas organisasi, lintas dinas, lintas masyarakat, termasuk salah satunya dinas KBPPPA. Kami menjadi komandan intervensi sensitif atau intervensi yang tidak langsung, yaitu dengan cara melakukan preventif, melakukan pencegahan-pencegahan bagaimana anak tersebut tidak menjadi angka stunting baru.” – Kepala bidang KS

Seperti yang dijelaskan bahwa ini menunjukkan adanya sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan program. Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik menjalankan program penanganan stunting melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan puskesmas untuk pelaksanaan posyandu dan pemantauan kesehatan ibu dan anak, KUA melalui pendampingan calon pengantin berbasis aplikasi ELSIMIL, lembaga pendidikan untuk penyuluhan gizi, serta organisasi masyarakat seperti PKK guna memperluas jangkauan hingga tingkat komunitas. Selain itu, inovasi digital

dikembangkan melalui portal Gresik Urus Stunting (GUS) dengan fitur Detak Keris (Deteksi, Tanggulasi, Kurangi Keluarga Risiko Stunting) sebagai upaya memperkuat efektivitas program secara menyeluruh.

Data kasus balita stunting, sembuh, dan lulus



Gambar 1. 2 website GUS "Gresik Urus Stunting"

Sumber: <https://gus.gresikkab.go.id/>

Sistem ini digunakan untuk pemantauan dan pendataan keluarga berisiko stunting secara real time. Keberadaan aplikasi tersebut memperkuat efektivitas komunikasi pembangunan karena tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi program secara berkelanjutan. Jika dilihat, desa Pongangan mengerahkan seluruh komponen untuk menunjang percepatan penurunan stunting. Sehingga program tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai institusi dan elemen masyarakat.

Ringkasan Temuan Penelitian Berdasarkan Model KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*)

Tahap KAP	Strategi/ Pendekatan KBPPPA	Temuan Lapangan	Keterbatasan/ Hambatan
Tahap 1: Knowledge (Pengetahuan)	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi audiens berdasarkan tingkat Pendidikan Penyebaran pesan berjenjang: koordinator → PPKBD → 	Pengetahuan masyarakat meningkat, terutama kelompok pendidikan menengah ke atas Pendekatan melalui tokoh masyarakat efektif	KAP gap: peningkatan pengetahuan tidak otomatis mengubah perilaku. Kelompok berpendidikan tinggi tetap berisiko stunting karena faktor pengasuhan

	<p>sub-PPKBD → masyarakat (two-step flow)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi tatap muka (posyandu, kunjungan rumah) • Komunikasi digital (WhatsApp Group, Instagram KBPPPA) 	<p>untuk kelompok berpendidikan rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program pra-nikah (ELSIMIL) menjadi fondasi pengetahuan sejak hulu 	<p>ke nenek, pengasuh dan tekanan kerja</p>
Tahap 2: Attitude (Sikap)	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan rumah oleh kader dan TPK (komunikasi interpersonal) • Pelibatan tokoh lokal (RW, tokoh agama, Muslimat, Aisyiyah) • Aplikasi GUS (Gresik Urus Stunting) untuk pemantauan data real time dan transparansi kondisi stunting • Kehadiran figur otoritas (Ibu Bupati) untuk membentuk sikap kolektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan sikap lebih kuat pada kelompok yang telah lama berinteraksi dengan kader • Kehadiran Ibu Bupati, pak camat, dan tokoh lainnya menciptakan efek emosional yang mendorong sikap rasa tanggung jawab masyarakat • Data GUS yang transparan mendorong rasa kepedilian bersama antara masyarakat dan pemangku kepentingan 	<p>Masyarakat pendatang dan pekerja industri bermobilitas tinggi: sulit membangun kepercayaan secara bertahap karena kurangnya waktu. Efektivitas model KAP sangat bergantung pada stabilitas sosial komunitas</p>
Tahap 3: Practice (Praktik)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan konsisten dan berulang oleh kader dan TPK • Program Orang Tua Asuh: KBPPPA menyisihkan gaji untuk biayai sembako keluarga berisiko selama 6 bulan • Evaluasi triwulanan bersama Puskesmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya partisipasi posyandu, keterbukaan terhadap kunjungan kader, dan penerapan pola hidup sehat • Program Orang Tua Asuh menghapus hambatan struktural (ekonomi) sebagai 	<p>Perubahan perilaku belum merata: hambatan struktural (kemiskinan, mobilitas tinggi) tidak dapat diselesaikan hanya melalui komunikasi. Model KAP cenderung mengabaikan faktor ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan</p>

	<p>dan Camat untuk memonitor perkembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi lintas sektor (MOU dengan Muslimat, Aisyiyah, KUA via ELSIMIL) 	<p>penghalang perubahan perilaku</p>	
Simpulan Pembahasan	<p>Model KAP yang diterapkan KBPPPA Gresik berjalan secara interaktif, adaptif, dan berlapis melampaui asumsi linier $K \rightarrow A \rightarrow P$. Model efektif pada kelompok sosial-ekonomi stabil, namun terbatas pada komunitas rentan secara struktural. Komunikasi pembangunan yang efektif memerlukan kombinasi pendekatan interpersonal, struktural, dan digital secara simultan, diperkuat dengan integrasi Model Komunikasi Partisipatif agar masyarakat menjadi subjek aktif, bukan sekadar penerima pesan.</p>		

Model KAP tahap pertama (*knowledge*), peningkatan pengetahuan adalah langkah awal yang krusial. KBPPPA menggunakan kombinasi media tatap muka dan digital (WhatsApp, Instagram) dengan pola penyebaran pesan berjenjang melalui koordinator hingga kader mencerminkan model *two-step flow*. Meski pengetahuan masyarakat meningkat, masih terdapat *KAP gap*: pengetahuan tidak otomatis mengubah perilaku, karena faktor seperti pengasuhan oleh nenek, tekanan kerja, dan keterbatasan waktu. Ini membuktikan bahwa alur $K \rightarrow A \rightarrow P$ terlalu linier untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks.

Tahap kedua, perubahan sikap dalam model KAP tidak terjadi otomatis setelah seseorang memperoleh pengetahuan. KBPPPA membangun perubahan sikap melalui dua pendekatan: komunikasi interpersonal (kunjungan rumah oleh kader dan TPK) dan pelibatan tokoh lokal, yang menciptakan kepercayaan dan keterbukaan masyarakat. Inovasi digital GUS (Gresik Urus Stunting) mendukung pemantauan real time dan mendorong sikap kolektif melalui transparansi data. Namun, perubahan sikap lebih sulit terbentuk pada masyarakat pendatang atau pekerja industri bermobilitas tinggi, menunjukkan bahwa efektivitas model KAP sangat bergantung pada stabilitas sosial komunitas.

Tahap terakhir (*practice*) dalam model KAP adalah penerapan pengetahuan dan sikap positif ke tindakan nyata, namun merupakan tahap tersulit karena dipengaruhi faktor struktural seperti ekonomi, akses layanan, dan kebiasaan lama. Di Desa Pongangan, perubahan yang terlihat antara lain meningkatnya partisipasi posyandu dan penerapan pola makan lebih baik, berkat pendampingan konsisten dari kader dan TPK. Meski demikian, perubahan belum merata masyarakat pendatang, pekerja industri, dan kelompok ekonomi lemah masih terhambat oleh faktor struktural. Ini menunjukkan kelemahan model KAP yang terlalu berfokus pada individu dan mengabaikan faktor seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial.

Temuan penelitian juga didapatkan peneliti saat melakukan observasi. KBPPPA mengintegrasikan program komunikasi sejak hulu melalui pendampingan calon pengantin berbasis aplikasi ELSIMIL yang bekerja sama dengan KUA. Pasangan wajib mengunduh aplikasi ini dan mendapatkan sertifikat kesiapan nikah sebagai syarat menikah, jika belum siap secara fisik atau ekonomi, bidan menyarankan penundaan kehamilan. Pendekatan ini mencerminkan model komunikasi pembangunan preventif berbasis data, yang dalam perspektif KAP bertujuan membangun pengetahuan (*knowledge*) dan sikap positif (*attitude*) terhadap kesehatan reproduksi sebelum kehamilan terjadi, sehingga risiko stunting dapat dicegah dari akarnya. Kombinasi konseling pra-nikah (interpersonal) dan teknologi digital (ELSIMIL) menunjukkan bahwa model KAP yang diterapkan KBPPPA lebih berlapis dan komprehensif dari sekadar kegiatan posyandu. KBPPPA juga melakukan program orang tua asuh. Program orang tua asuh adalah inovasi di mana anggotanya menyisihkan sebagian gaji untuk membiayai sembako keluarga berisiko stunting selama enam bulan. Program ini berangkat dari pemahaman bahwa hambatan utama perubahan perilaku bukan sekadar kurangnya pengetahuan, melainkan keterbatasan ekonomi. Dari perspektif komunikasi pembangunan, program ini melampaui fungsi konvensional karena komunikator tidak hanya menyebarkan pesan, tetapi juga aktif menghapus hambatan struktural dan turut menanggung beban komunitas sasaran. KBPPPA juga menerapkan figur otoritas sebagai strategi komunikasi ketika pendekatan kader dan TPK menemui jalan buntu. Kehadiran langsung tokoh seperti Ibu Bupati Gresik ke lingkungan warga terbukti menciptakan efek perhatian yang lebih kuat dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Strategi ini mencerminkan penerapan teori opinion leader pada level yang lebih tinggi melampaui tokoh lokal menuju figur kekuasaan formal. Temuan ini memperluas pemahaman model KAP, bahwa perubahan sikap tidak hanya terbentuk melalui informasi dan argumen rasional, tetapi juga melalui momen emosional yang ditimbulkan oleh kehadiran figur yang dipercaya dan dihormati masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa model KAP yang diterapkan KBPPPA telah melampaui asumsi liniernya, karena dalam praktiknya berjalan secara interaktif, adaptif, dan berlapis yang dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, sikap, kondisi ekonomi, dan lingkungan sosial secara bersamaan. Model ini efektif pada kelompok yang relatif stabil, namun memiliki keterbatasan pada kelompok yang rentan secara struktural. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan integrasi Model Komunikasi Partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, bukan sekadar penerima pesan. Mengingat tingginya mobilitas warga pendatang di Desa Pongangan, pendekatan partisipatif dapat membangun rasa kepemilikan terhadap program sehingga kepatuhan tidak bergantung pada intensitas kunjungan kader. Kesimpulannya, komunikasi pembangunan yang efektif memerlukan kombinasi adaptif antara model KAP dan komunikasi partisipatif yang disesuaikan dengan karakteristik spesifik komunitas.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model komunikasi pembangunan yang diterapkan oleh KBPPPA Kabupaten Gresik dalam

membangun kesadaran masyarakat berisiko stunting di Desa Pongangan menggunakan pendekatan komunikasi perubahan perilaku berbasis *Knowledge, Attitude, and Practice* (KAP). KBPPPA Kabupaten Gresik menerapkan Model KAP (Knowledge, Attitude, Practice) yang bersifat adaptif, berlapis, dan interaktif dalam mencegah stunting di Desa Pongangan. Model ini mencakup empat tahapan: identifikasi kelompok sasaran, penyusunan pesan persuasif, penyebaran melalui kombinasi komunikasi tatap muka dan digital, serta evaluasi triwulanan berbasis data sistem GUS. Dalam praktiknya, model KAP ini melampaui asumsi liniernya karena dipengaruhi secara dinamis oleh faktor pengetahuan, sikap, ekonomi, dan budaya secara bersamaan. Meski efektif pada kelompok yang relatif stabil, model ini memiliki keterbatasan pada komunitas yang rentan secara struktural. Oleh karena itu, direkomendasikan agar KBPPPA mengintegrasikan Model Komunikasi Partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif, serta memperluas kolaborasi lintas sektor termasuk dengan pihak industri melalui program CSR, guna membangun gerakan pencegahan stunting yang lebih berkelanjutan dari dalam komunitas itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara Hafied. (2020). *Komunikasi Pembangunan : Telaah untuk memahami konsep, filosofi, serta peran komunikasi terhadap pembangunan dan pembangunan Komunikasi dalam era digital* (Hayati Sri Yayat, Ed.; 1st ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Creswell J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Herdian Nugroho, B. (2024). *CENTRAL PUBLISHER STRATEGI KOMUNIKASI KESEHATAN HUMANIS DAN KONTEKSTUAL UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN LOMBOK UTARA*. 2(7), 1–13. <http://centralpublisher.co.id>
- Kesehatan Kementerian Republik Indonesia. (2018). *PEDOMAN STRATEGI KOMUNIKASI*.
- Leavy, P. (2017). *Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community- Based Participatory Research Approaches*. The Guilford Press.
- Pratiwi, G. B., & Kurniasari, N. D. (2024). Efektivitas Komunikasi Kesehatan Upaya Peningkatan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting Di Desa Gili Timur. *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 4(3), 952–957. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i3.2352>
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya Stunting Problems and Prevention. *Juni*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.253>
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Saputra Adi Ikhsan, Muh. Umran Ode La, & Husain M. Najib. (2024). *MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN UNTUK PENURUNAN STUNTINGDI SULAWESI TENGGARA*. 2.

- Wakil Sekretariat Presiden Indonesia. (2019). *STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENCEGAHAN ANAK Kerdil (STUNTING)* (2nd ed.).
https://eprints.poltekkesadisutjipto.ac.id/id/eprint/1992/1/Stranas%20Stunting%202025-2029_V1.0.pdf
- Zaen, N. L., Hayati, N., Rangkuti, S., Fakultas, P. K., Kesehatan, I., Haji, U., & Utara, S. (2024). *PENYULUHAN KESEHATAN TENTANG PENCEGAHAN STUNTING SEBAGAI UPAYA PROMOSI KESEHATAN PADA IBU HAMIL DAN IBU YANG MEMILIKI BALITA DI POSYANDU CARDIOL KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA I. 2*. <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/abdimas>